

Nadiem sebagai pengusaha yang tidak memiliki latar belakang keilmuan pendidikan menjadi alasan keterkejutan sebagian masyarakat kita. Telah banyak ulasan disampaikan akademisi, praktisi pendidikan, warga masyarakat biasa tentang menteri baru ini. Ulasan itu bervariasi mulai dari yang optimistis, pesimistis, sampai dengan yang netral dan menunggu kinerja nyata Nadiem dalam memimpin kementerian ini dalam 100 hari pertama. Beberapa tantangan baru pasti akan dihadapi oleh Nadiem Makarim dalam 5 tahun kepemimpinannya ke depan.

Tantangan pertama yang mungkin dia hadapi adalah pola pikir masyarakat yang telah terbentuk bahwa keberhasilan pendidikan hanya dilihat dari nilai rapot dan angka-angka hasil ujian. Pola pikir semacam ini tidak hanya menghinggapi masyarakat khususnya orangtua siswa sebagai pemangku kepentingan pendidikan, tetapi juga pada sebagian guru, kepala sekolah, dan kepala dinas pendidikan. Konsekuensi dari pola pikir semacam ini membuat kebijakan pendidikan hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai hasil ujian yang tinggi. Sehingga ketika siswa memasuki tahun akhir pendidikannya, waktunya akan lebih banyak dihabiskan untuk berlatih mengerjakan soal-soal ujian. Jika demikian, sekolah tak ubahnya menjadi bimbingan belajar seperti kursus atau bimbingan tes yang menjamur di pinggir jalan. Kebijakan pendidikan semacam ini akan meminggirkan tujuan pendidikan guna menciptakan generasi yang inovatif, kreatif, tahan banting, telaten, dan mampu mencari solusi di setiap kebuntuan permasalahan hidup.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan pendidikan di Indonesia antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti halnya yang disampaikan pakar pendidikan Dharmaningtyas, salah satu masalah utama pendidikan di tanah air adalah kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, bahkan daerah perkotaan dengan daerah terpencil yang sering disebut daerah 3T (tertinggal, terdapat, terluar). Kesenjangan itu meliputi hampir seluruh komponen yang ada di dalam proses pembelajaran seperti kualitas fasilitas pendidikan, kualitas infrastruktur, kualitas siswa, tingkat sosial ekonomi dan pendidikan orangtua siswa, dan juga kualitas guru. Selain kesenjangan, keberagaman budaya dan sosial di tanah air juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi menteri ini. Sebagai contoh adalah pengalaman penulis sendiri, di mana ia bersekolah di daerah pedesaan yang notabene sebagian besar mata pencaharian orang tua siswa adalah sebagai petani. Orang tua seringkali membutuhkan bantuan anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan mereka di sawah pada musim tanam atau panen, sehingga sebagian besar muridnya tidak dapat masuk sekolah pada hari-hari tersebut. Kondisi tersebut pasti berbeda dengan sekolah di perkotaan yang hal di atas hampir tidak pernah terjadi. Dengan kondisi tersebut, apakah perlu ada penyesuaian kalender akademik sekolah menyesuaikan dengan musim panen dan bercocok tanam? Demikian juga untuk daerah masyarakat nelayan, industri, pinggiran, masyarakat terpencil, suku pedalaman, dan sejenisnya yang tentu saja membutuhkan pemikiran tentang perlu tidaknya kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Dan dengan fakta kesenjangan dan keberagaman ini, apakah menteri Nadiem masih akan tetap memberlakukan Kurikulum Nasional yang berisi penyeragaman standard isi dan proses pembelajaran? Masihkah ia akan memberlakukan sistem Ujian Nasional sebagai wujud implementasi penyeragaman tersebut? Tentu saja hal ini akan menjadi tantangan baru yang kita bersama sedang menunggu kebijakannya.

Adanya pemeo ganti menteri ganti aturan, juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi perhatian Nadiem Makarim. Selama 3 atau bahkan 4 dekade terakhir ini, telah berkembang opini di kalangan masyarakat luas bahwa setiap pergantian menteri pendidikan akan diikuti dengan pergantian kurikulum, khususnya di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Melihat rekam jejak Nadiem sebagai seorang pendobrak, tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan perubahan, atau bahkan dobrakan baru berupa

aturan baru yang cukup fundamental. Pengalamannya mengenyam pendidikan di luar negeri sejak SMA hingga S2 diperkirakan akan mewarnai perubahan baru yang akan ia usung. Di sinilah tantangan baginya untuk melakukan transisi mulus agar dobrakan baru yang ia lakukan tidak menyebabkan gegar budaya bagi pemangku kepentingan di bawahnya.

Kompetensi, link and match, dan pembangunan karakter, adalah tiga kata yang menjadi kunci pengelolaan pendidikan di bawah menteri Nadiem Makarim. Tiga kata kunci itu ia sampaikan beberapa saat setelah dilantik. Jika kompetensi dan link and match yang ia maksudkan adalah peningkatan kompetensi lulusan agar "match" dengan kebutuhan dunia kerja, maka salah satu paradigma yang ia kembangkan ke depan kemungkinan adalah



Tantangan Baru Sang CEO Dalam Paradigma Pendidikan

OLEH : SUGENG ADI SUSILO

menciptakan pendidikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah terstruktur dan tertata. Pendidikan akan diarahkan untuk mengisi level-level tertentu dalam masyarakat baik okupasi jabatan maupun level pekerjaan profesional. Pada level pembelajaran akan diciptakan kompetensi-kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan struktur masyarakat yang telah terstruktur itu. Namun, Menteri Nadiem juga perlu menjadikan paradigma pendidikan sebagai upaya menciptakan masyarakat pembelajar (*learning society*), di mana pendidikan diarahkan untuk membelajarkan manusia mengikuti kebutuhan individu. Kebijakan pendidikan hendaknya tidak ditetapkan secara otoriter, melainkan ditetapkan untuk lebih berorientasi pada pengembangan potensi individu. Sebuah pendidikan yang memberi kesempatan kepada para individu untuk bebas "mempelajari diri" yang memungkinkan untuk lahir seorang Stephen Hawking baru, Pablo Picasso baru, atau bahkan Nadiem Makarim baru.

Tantangan terakhir adalah tentang pengelolaan perguruan tinggi. Tantangan ini telah banyak disorot oleh berbagai pihak khususnya akademisi. Sebagian meragukan kemampuannya mengelola sistem pendidikan tinggi di tanah air karena adanya kemungkinan resistensi dari para pejabat di lingkungan pendidikan tinggi yang tadinya berada di bawah manajemen Kementerian Riset dan Teknologi (Ristekdikti). Resistensi itu bisa disebabkan oleh dua alasan utama; pertama, kemungkinan sebagian pejabat di lingkungan pendidikan tinggi memandang Nadiem dengan sebelah mata mengingat ia hanya lulusan S2 sementara dia akan menjadi atasan dari pejabat-pejabat dan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) yang telah bergelar doktor, dan bahkan profesor. Banyak diantara mereka yang juga lulusan Harvard seperti halnya dirinya. Selain itu, para pemangku kepentingan di dunia pendidikan tinggi adalah orang-orang yang secara kodrati memiliki sikap kritis dan analitis terhadap fenomena baru di

bidang pendidikan, yang alih-alih segera melaksanakan kebijakan yang diterbitkan menteri, tetapi lebih banyak menganalisis dan mengkritik kebijakan menteri baru yang nota bene memiliki tingkat pendidikan di bawah mereka. Alasan kedua, sebelumnya Dikti berada di kementerian tersendiri, penggabungan kembali Dikti ke dalam Dikbud akan menjadikan Dikti sebagai kerajaan dalam kerajaan, negara dalam negara dengan ego sektoralnya yang kental. Para pejabat tinggi di dalamnya adalah para "mahadewa" yang telah nyaman dengan sistem lama sehingga tidak mudah untuk begitu saja menerima sistem baru.

Kembali pada kata kunci "*link and match*" yang akan ia gulirkan, sebenarnya program ini pernah dilaksanakan Mendikbud era Wardiman Djojonegoro, seorang teknokrat lulusan Jerman yang notabene sebuah negara yang menekankan pada praksis pendidikan yang berkelindan dengan industri. Dengan kata lain, seperti dijelaskan di atas, pendidikan mungkin akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Di dunia pendidikan tinggi Indonesia saat ini, praksis pendidikan yang demikian lebih banyak diterapkan di pendidikan-pendidikan jalur profesi sejenis politeknik yang berbeda dengan paradigma pendidikan akademik yang ada di universitas-universitas. Jika "*link and match*" yang dimaksud oleh Mendikbud adalah setiap lembaga pendidikan tinggi harus menyiapkan lulusannya untuk mampu laku di pasar kerja, maka sangat mungkin banyak perguruan tinggi ke depan akan "kerasukan ruh politeknik" secara massal, di mana capaian pembelajaran tiap-tiap program studi diharuskan untuk mencantumkan dengan jelas kompetensi apa yang akan dicapai sekaligus profesi apa saja yang mungkin akan ditekuni oleh lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi tersebut. Maka, tantangannya adalah bagaimana agar paradigma pendidikan sebagai upaya menciptakan *learning society* sebagaimana dijelaskan di atas juga diperhatikan dalam kebijakan Mendikbud yang baru ini, karena pada prinsipnya kedua paradigma tersebut tidaklah bersifat dikotomi tetapi dapat saling melengkapi.

Selain itu, tujuan pendidikan tinggi bukan saja menciptakan masyarakat pembelajar dan menghasilkan lulusan yang siap pakai dan/atau siap latih untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, tetapi juga sebagai wahana preservasi budaya adi luhung bangsa. Program-program studi yang secara teori pasar lulusannya tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya memiliki andil besar dalam menjaga kemajemukan budaya bangsa. Sebutlah program studi Sastra Nusantara khususnya konsentrasi Filologi yang mempelajari naskah-naskah kuno misalnya, diperlukan sebagai penjaga dan penerus nilai-nilai budaya adi luhung bangsa yang tersurat di dalam kitab-kitab kuno yang keberadaannya tersebar di seluruh Nusantara. Demikian juga dengan program-program studi lainnya seperti Sejarah, Seni Pedalangan, Seni Karawitan, Bahasa dan Sastra Jawa, Bahasa dan Sastra Bali, Filsafat, Antropologi Budaya, Arkeologi yang mungkin agak susah dicari "*link and match*"nya dengan dunia industri saat ini, tetapi mereka sangat dibutuhkan keberadaannya di negeri ini sebagai penjaga warisan budaya Nusantara dan dunia.

Dalam wawancaranya beberapa saat setelah dilantik, Nadiem Makarim mengakui bahwa tantangan utama yang akan ia hadapi adalah keluasan cakupan kementerian yang akan ia pimpin, dengan jumlah siswa, sekolah, mahasiswa, perguruan tinggi, dan pejabat-pejabat yang terkait yang begitu besar, ditambah lagi dengan keragaman sosiokulturalnya. Mengelola keluasan dan keragaman cakupan ini menjadi tantangan baru yang tentu saja sangat berbeda jika dibandingkan dengan mengelola startup Gojek. Nadiem menyadari benar bahwa pendidikan adalah investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek, akan tetapi jangka yang sangat panjang, bahkan mungkin lebih dari satu generasi. Namun Nadiem Makarim adalah seorang pendobrak, penikmat, dan pecinta tantangan. Patut diyakini bahwa dengan keberhasilan dia membangun Gojek dari tidak ada menjadi begitu menggurita, ia akan mampu mengatasi tantangan baru sebagai Mendikbud, karena Nadiem Makarim telah identik dengan tantangan. Nadiem adalah tantangan itu sendiri.

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya